



INDEKS DEMOKRASI RI DEKATI NOL

Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi, Gerakan Akademisi Kembali Getol



**Government (Hal.3)
Beras Masih Mahal,
Muncul Dugaan
Permainan Harga**

KET

ED: Electoral Democracy
- : indicates that the country could also belong to the lower category
+ : indicates that the country could also belong to the higher category
↕ : indicates a country moving from one category to another
➡ : In an episode of autocratization, as of 2023
➡ : In an episode of autocratization, as of 2023

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2024 VERSI V-DEM INSTITUTE

COUNTRY	2023	CHANGE FROM 2013	EPISODE
Austria	ED+	0	
Cyprus	ED+	0	
Greece	ED+	0	➡
Israel	ED+	0	
Jamaica	ED+		
Lithuania	ED+	0	
Malta	ED+		
Moldova	ED+		
Montenegro	ED+	0	➡
Namibia	ED+		
Portugal	ED+	0	
Slovenia	ED+	0	
Trinidad and Tobago	ED+	0	
Vanuatu	ED+		
Argentina	ED		
Armenia	ED	0	➡
Bolivia	ED		➡
Brazil	ED		➡
Bulgaria	ED		
Cape Verde	ED		
Colombia	ED		
Croatia	ED		➡
Dominican Republic	ED		➡
Ecuador	ED		
Gambia	ED	0	➡
Georgia	ED		
Ghana	ED	0	➡
Kosovo	ED		➡
Lesotho	ED		➡
Liberia	ED		
Malawi	ED		
Maldives	ED	0	➡
Nepal	ED	0	
North Macedonia	ED	0	➡
Panama	ED		
Paraguay	ED		
Peru	ED		➡
Poland	ED	0	➡
Romania	ED		➡
S.Tomé & P.	ED		
Senegal	ED		➡
Slovakia	ED	0	
Solomon Islands	ED		➡
South Africa	ED		
Sri Lanka	ED	0	
Timor-Leste	ED		➡
Albania	ED-		
BiH	ED-		
Botswana	ED-	0	➡
Fiji	ED-	0	➡
Guatemala	ED-		➡
Guyana	ED-		➡
Honduras	ED-	0	➡
Indonesia	ED-		➡
Kenya	ED-		
Malaysia	ED-	0	
Mexico	ED-		➡
Mongolia	ED-		➡
Zambia	ED-	0	➡

Kondisi demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Data indeks demokrasi Indonesia 2024 versi V-Dem Institute, posisi negeri ini terjun bebas. Ranking Indonesia mendekati 0 (nol), lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste. Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan, duju Indonesia terbaik di urutan ke-63. Sekarang posisi 87 dengan skor tinggal 0,36. Sejumlah akademisi, aktivis hingga guru besar kembali getol menyoroti kelamnya demokrasi di Indonesia. Mereka menggelar kegiatan Temu Ilmiah Universitas Memanggil di Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (14/3/2024). Gerakan serupa terjadi di Yogyakarta yang menggeber Aksi Sejangad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi. Aktivis menyerukan kegundahannya di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Pakar hukum tata negara membenarkan, kualitas demokrasi Indonesia selama 9 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kemunduran. Buktinya, kritik terhadap kekuasaan, pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara saat ini sedang dimatikan.

Baca di hal 11....

JADWAL IMSAKIYAH RAMADAN 1445 H/2024 KOTA SURABAYA

TANGGAL	11 Mar 2024	12 Mar 2024	13 Mar 2024	14 Mar 2024	15 Mar 2024	16 Mar 2024	17 Mar 2024
IMSAK	04:09	04:09	04:09	04:09	04:09	04:09	04:09
SUBUH	04:19	04:19	04:19	04:19	04:19	04:19	04:19
TERBIT	05:31	05:31	05:31	05:30	05:31	05:31	05:30
DUHA	05:58	05:58	05:58	05:58	05:58	05:57	05:57
ZUHUR	11:42	11:42	11:42	11:41	11:41	11:41	11:41
ASAR	14:49	14:50	14:50	14:50	14:50	14:51	14:51
MAGHRIB	17:47	17:46	17:46	17:45	17:45	17:44	17:44
ISYAH	18:56	18:55	18:55	18:54	18:55	18:53	18:53

Beras Masih Mahal, Muncul Dugaan Permainan Harga

JAKARTA-Gaung dari pemerintah bila stok beras aman, tak diikuti penurunan harga di pasar. Satgas Pangan Polri pun tengah mendalami dugaan adanya permainan harga bahan pokok tersebut.

"Masih pendalaman," ujar Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan Kamis (14/3/2024).

Diketahui, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan, harga beras Kamis (14/3/2024) bertahan di Rp16.000 per kg untuk jenis medium I. Sedangkan beras kualitas medium II naik Rp50 jadi Rp15.800 per kg.

Harga beras kualitas super I bertengger di Rp17.350 per kg dan kualitas super II naik Rp50 ke Rp16.800 per kg. Harga beras kualitas bawah I naik Rp100 ke Rp14.800 per kg dan kualitas bawah II naik Rp50 ke Rp14.500 per kg.

Lebih lanjut, Satgas Pangan Polri terus melakukan pengawasan terhadap proses distribusi bahan pokok penting (bapokting). Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Whisnu mengatakan, sejauh ini memang ditemukan adanya peningkatan permintaan bahan pokok seperti beras, telur, ayam dan minyak goreng. Hal itu terjadi karena konsumsi masyarakat yang meningkat meningkat di bulan Ramadan.

"Sedangkan, pengamatan Satgas Pangan Polri di tingkat distributor hingga saat ini beberapa Gudang Distribution Center atau pusat distribusi sudah men-supply bapokting (bahan pokok dan penting) ke outlet-outletnya untuk pemenuhan kebutuhan hingga beberapa minggu ke depan," kata Whisnu.

Whisnu membeberkan, harga beras medium SPHP pada ritel modern di kawasan Jabodetabek masih berada di harga Rp 10.900 per kilogram. Sedangkan, untuk harga beras premium bervariasi di angka Rp 12.800 hingga Rp 16.500 per kilogramnya.

Kemudian, untuk minyak goreng premium masih terpantau berada di harga Rp 16.650 per liter, telur ayam di harga Rp 32.100 per kilogram, cabai rawit merah di harga Rp 63.900 per kilogram, dan daging ayam pada harga Rp 45.900 hingga Rp 50.000 per kilogram.

Menurut Whisnu, pemantauan juga dilakukan oleh Satgas Pangan Daerah di beberapa pasar tradisional. Misalnya di Pasar Tambahrejo, Surabaya, terpantau harga beras medium berada di harga Rp 10.900 per kilogram, telur ayam Rp 31.000 per kilogram, dan daging sapi Rp 106.666 per kilogram.

Whisnu mengatakan, Satgas Pangan juga melakukan koordinasi dengan Korlantas Polri terkait



(Ilustrasi) Harga beras masih mahal saat pemerintah menjamin ketersediaan stoknya. (Dok.ist)

pengawasan kendaraan yang mengangkut bahan pokok tersebut.

"Selain memastikan ketersediaan dan pemantauan harga, Satgas Pangan berkoordinasi dengan Korlantas dalam memastikan kelancaran kendaraan yang mengangkut komoditi pangan agar pendistribusian dari daerah sentra produksi tidak terhambat," kata Whisnu.

Mendag Klaim April Bisa Turun

Sementara, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, harga beras lokal baru bisa turun pada bulan depan atau April mendatang. Sebab, kata dia, masa panen raya baru dimulai April dan Mei 2024.

"Mudah-mudahan bulan depan sudah panen raya sehingga bulan depan harga (beras lokal) bisa turun," kata Zulhas di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Zulhas mengatakan, saat ini harga beras lokal masih tinggi, lantaran stok beras di petani menipis.

Karenanya, kata dia, pemerintah menggelontorkan beras beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).

"Yang (beras) premiumnya Rp 14.000 per kg, yang beras SPHP Rp 11.000 per kg, jadi masyarakat bisa milih, kalau kemahalan bisa ke SPHP di Bulog harganya tetap," ujarnya.

Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta masyarakat agar tidak panik dan khawatir dengan pasokan beras selama Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah karena saat ini sejumlah daerah di Indonesia sudah memasuki panen raya.

"Kami memastikan kebutuhan beras pada bulan Maret, April dan Mei mendatang dalam kondisi aman. Artinya, masyarakat tak perlu khawatir akan kekurangan beras pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang," kata Amran dalam

keterangan di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Amran mengatakan, kepastian tersebut merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait panen raya petani yang berlangsung pada bulan Februari dan Maret tahun ini.

Kementan menyebut bahwa berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), dimana pada Maret 2024 diperkirakan produksi beras mencapai 3,51 juta ton. Angka itu berada di atas kebutuhan bulanan nasional sebesar 2,5 juta ton.

"Insya Allah sesuai dengan data BPS, kebutuhan beras kita untuk Maret April dan Mei dalam kondisi aman. Akan tetapi untuk kebutuhan bulan Juni kita bisa menghitung dari pertanaman sekarang (Maret)," katanya.

Sementara itu, produksi padi pada tahun ini diperkirakan melimpah dan memberi pengaruh besar pada penurunan harga beras di pasaran. Meski demikian, dia berharap penurunan tersebut tidak terjadi pada hasil panen raya gabah petani.

"Maret harga beras pasti turun. Aku pastikan turun. Kalau ada yang bilang beras mahal hari ini sudah turun, aku pastikan turun dan Ramadhan aman, Idul Fitri aman, lewat dua bulan Idul Fitri masih aman. Nah kalau mengatakan Juni kita lihat tanam hari ini," jelas Amran.

Kementan menyebut salah satu provinsi yang memastikan produksi padi tahun ini dalam kondisi melimpah yakni Jawa Timur. Diperkirakan, luas panen di wilayah provinsi tersebut pada Maret dan April 2024 mencapai 928.105 hektare dengan produksi periode Januari-April diperkirakan mencapai 5,219 juta ton gabah kering giling (GKG) atau jika dikonversi ke beras bisa mencapai 3,346 juta ton.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya mengatakan

bahwa puncak panen akan berlangsung pada bulan April mendatang dengan luasan 402.698 hektare. Dengan luasan tersebut, Jawa Timur memastikan pasokan beras di pasaran aman.

"Untuk itu, kami membuat mapping wilayah sentra produksi dan pemantauan jadwal panen untuk mencukupi kebutuhan pasokan pangan secara merata di Jatim dan nasional," ujar Dydik.

Dydik mengatakan, sejumlah kabupaten yang tengah panen tahun ini di antaranya Jember seluas 67.960 hektare, Ngawi 47.916 hektare, Tuban 44.701 hektare, Pasuruan 50.064 hektare, Lamongan 57.646 hektare dan Bojonegoro seluas 73.657 hektare. (Wid,nat,ist/dya)

PERBANDINGAN HARGA BERAS (PER KG) PERIODE 6-14 MARET 2024:

BERAS SECARA RATA-RATA

6 Maret:	Rp15.700
11 Maret:	Rp15.000
12 Maret:	Rp15.100
14 Maret:	Rp15.750

1. Beras Kualitas Bawah I

6 Maret:	Rp14.600
11 Maret:	Rp13.800
12 Maret:	Rp13.650
14 Maret:	Rp14.600

2. Beras Kualitas Bawah II

6 Maret:	Rp14.400
11 Maret:	Rp14.200
12 Maret:	Rp14.150
14 Maret:	Rp14.350

3. Beras Kualitas Medium I

6 Maret:	Rp15.850
11 Maret:	Rp15.100
12 Maret:	Rp15.200
14 Maret:	Rp15.850

4. Beras Kualitas Medium II

6 Maret:	Rp15.600
11 Maret:	Rp14.600
12 Maret:	Rp14.500
14 Maret:	Rp15.600

5. Beras Kualitas Super I

6 Maret:	Rp17.050
11 Maret:	Rp16.000
12 Maret:	Rp16.050
14 Maret:	Rp17.050

6. Beras Kualitas Super II

6 Maret:	Rp16.550
11 Maret:	Rp15.800
12 Maret:	Rp15.700
14 Maret:	Rp16.550

DPR Sebut Kekhususan Jakarta Belum 'Clear' Muncul Usul Sukabumi Masuk kawasan Aglomerasi

JAKARTA - Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah yang diwakili Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas terkait RUU DKJ berkangsung gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024). Namun, hasil rapat dinilai belum jelas menunjukkan kekhususan Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara.

"Tentang kekhususan Jakarta ini kan belum clear. Apa sih yang mau diberikan kekhususan pada Jakarta, itu yang belum clear," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Ia juga menyatakan, sikap pemerintah soal pengangkatan dan pemberhentian kepala DKJ oleh presiden belum jelas. Dalam rapat, menurut dia, pemerintah juga menyinggung soal kemungkinan pemilihan kepala daerah di DKJ melalui DPRD.

"Nah tapi pemerintah menyampaikan, pilihannya dari DPRD itu juga demokratis, tetapi dia punya argumentasi yang lain, pengalaman-pengalaman yang lain," ucap Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR ini.

Oleh karena itu, Awiek meminta masyarakat menunggu hasil rapat Baleg DPR bersama pemerintah. Dalam waktu dekat, rapat tentang RUU DKJ bisa saja dilakukan dengan mengambil hari fraksi.

"Sekali lagi, ini baru draf RUU, insya Allah kalau kita sepakat menggunakan hari Jumat (15/3/2024) untuk melakukan rapat kerja, insya Allah selesai (kekhususan Jakarta)," ujar Awiek.

Achmad Baidowi juga menyebutkan muncul usulan agar Sukabumi dimasukkan ke dalam kawasan aglomerasi pada Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

"Ada usulan Sukabumi itu dimasukkan juga karena menjadi satu kesatuan karena mengantisipasi perkembangan kota ke depan," kata Awiek.

Dia menyebut bahwa pada rapat panja pembahasan DIM RUU DKJ muncul sejumlah wilayah untuk masuk dalam kawasan aglomerasi.

Meski demikian, kata Awiek, usulan yang ada itu tidak bisa masuk dalam RUU DKJ karena penentuan wilayah yang masuk kawasan aglomerasi merupakan ranah kewenangan pemerintah untuk mengaturnya melalui peraturan pemerintah (PP).

"Usulan yang ada itu tidak bisa masuk dalam undang-undang karena kawasan aglomerasi, daerah mana saja yang masuk, itu diatur aturan teknis oleh pemerintah," katanya.

Adapun, lanjut dia, berdasarkan peraturan pemerintah kawasan aglomerasi itu meliputi Bogor, Depok,



Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (Panja RUU DKJ) antara DPR dan pemerintah menggelar rapat mengenai ketentuan kawasan aglomerasi di sekitar Jakarta, Kamis (14/3/2024).ist

Tangerang, Bekasi, Puncak, hingga Cianjur atau Bodetabekpunjur.

Dewan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden

Di sisi lain, Baleg DPR bersama pemerintah menyepakati agar ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ ditunjuk oleh presiden. Hal ini diungkapkan Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.

"Ketua dan anggota Dewan Kawasan ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia. Oke? Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden. Jadi ditunjuk lewat Keputusan Presiden," kata Supratman di ruang sidang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Dengan demikian, lanjut Supratman, presiden nantinya bebas menunjuk siapa saja menjadi ketua Dewan Kawasan Aglomerasi. Bisa wakil presiden seperti di draf awal RUU DKJ, atau bisa tokoh yang lain.

"Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, kita problem ketatanegaraan kita menjadi selesai," ujarnya sambil mengetok palu tanda kesepakatan.

Sebelum sampai pada kesepakatan, anggota Baleg DPR Fraksi NasDem, Taufik Basari (Tobas) menyebut ketentuan wapres memimpin Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam RUU DKJ bertentangan dengan konstitusi negara yang menganut sistem presidential. Pria yang disapa Tobas itu menuturkan jika dalam sistem presidential, seharusnya presiden yang memiliki kewenangan atributif.

"Problemnya ketika rumusnya kemudian adalah UU ini memberikan kewenangan kepada wapres, maka di dalam hukum administrasi negara itu, kan, kewenangan atributif, kewenangan yang diberikan oleh UU atau aturan perundang-undangan artinya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan sistem presidential

menurut konstitusi," kata Tobas.

"Kewenangan itu bisa saja diberikan kepada wapres atau wagub misalnya kalau dalam konteks provinsi atau wakil bupati dalam konteks kabupaten. Dalam posisi seperti itu jika dia kewenangannya itu bukan atributif," lanjut Tobas.

Dia berpandangan sebaiknya tanggung jawab pemerintahan di DKJ tetap kepada presiden. Namun, kata Tobas, presiden bisa memberikan mandat kepada pihak lain seperti

wapres untuk menjalankan tugas.

"Apabila kemudian Dewan Kawasan Aglomerasi ini dianggap terlalu berat apabila semua ditujukan presiden, tapi itu bisa dilaksanakan pihak lain tetap tanggung jawab tetap ada di presiden secara atributif," ucap anggota Komisi II DPR itu.

Karena itu, dalam pembahasan DIM RUU DKJ, sebaiknya dibahas diksi yang tepat untuk kepemimpinan di DKJ agar sesuai dengan aturan konstitusi.

"Tetapi kita coba mendiskusikan membuka ruang bagi presiden untuk mendelegasikan kewenangan ini atau memberikan mandat kewenangan ini kepada pihak-pihak tertentu terserah itu siapa, mau Menko atau wapres tapi bentuknya bukan atributif menurut UU supaya kita tidak melanggar konstitusi," kata Tobas.

Ketua DPP NasDem itu menuturkan, pemberian mandat presiden kepada wapres dapat diberikan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Tinggal pilih dua apakah delegasi atau mandat karena itu rumusnya harus kita bunyikan misalnya Dewan Aglomerasi dipimpin presiden dan dapat didelegasikan misalnya atau dapat diberikan mandat dengan Keppres atau apa pun tapi bentuknya bukan atributif," tandas Tobas. (wid,rls,ist,ant/dya)

KOMPAK BILANG GUBERNUR DKJ DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

"Tentang isu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih (melalui pilkada) atau tidak berubah sesuai dengan yang dilaksanakan saat ini."



Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

"Untuk Gubernur Daerah Khusus Jakarta akan dipilih langsung seperti pilkada di daerah lain. Jadi, kalau ada informasi yang menyatakan bahwa untuk Gubernur Daerah Khusus Jakarta itu ditetapkan dengan mekanisme yang lain, itu adalah pendapat yang keliru."



Wakil Ketua Komite I DPD Sylviana Murni

"DPD RI sepakat, sejalan, berpandangan bahwa metode pengisian jabatan gubernur harus tetap dipilih sebagaimana disampaikan oleh pemerintah yang secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pilkada, sebagaimana sudah berlangsung sejak tahun 2005."

Kenaikan Harga Bahan Pokok Akibat Inkonsistensi Implementasi Grand Design



Pasar sebagai salah satu tempat perdagangan bahan pokok yang belakangan harga terus naik.

kebutuhan masyarakat oleh pemerintah.

Naiknya harga bahan pokok menjadi isu yang sedang ramai tersorot belakangan ini terutama usai pesta pemilu digelar. Berbagai komoditas semakin menunjukkan kenaikan harga dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Dr Gitadi Tegas Supramudyo M Si, menuturkannya bahwa kenaikan harga bahan pokok menjadi sesuatu yang selalu ada sejak zaman dulu.

Menurutnya berdasarkan cara pandang policy studies, hal ini terjadi karena inkonsistensi dalam implementasi grand design kebijakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kesalahan ini kemudian terulang karena banyak faktor seperti kebijakan yang tidak unggul dan cerdas, tidak jelas dan berubah-ubah

hingga posisi tawar negara terhadap pengusaha lemah sehingga kepentingan rakyat dan publik menjadi nomor dua karena terdapat banyak intervensi.

"Sudah ada peta yang menunjukkan selalu terjadi kenaikan harga pada masa-masa tertentu seperti hari libur, hari raya, masa panen dan lain-lain. Kembali lagi, itu terjadi karena grand design yang diturunkan dalam policy instruments tidak cukup komprehensif. Bahan pokok itu sendiri akan memperoleh keamanan dan keamanannya ketika negara siap, misalnya untuk gabah bagaimana kemudian grand design terhadap perwujudan swasembada selama ini," jelasnya, Kamis (14/3/2024).

Ia menambahkan bahwa Indonesia yang merupakan negara agraris seharusnya memiliki semangat swasembada, sayangnya saat ini terganggu dengan semakin besarnya impor. Padahal, cadangan sembilan bahan pokok bisa menjadi alternatif dalam menghadapi fluktuasi harga di pasar.

"Sebagaimana perspektif klasik Keynes, keseimbangan supply and demand, maka harga dipengaruhi

tingginya permintaan. Jika hal ini terjadi, maka seharusnya diperlukan penambahan supply. Tetapi yang terjadi selama ini bukanlah supply by design yang disusun oleh kebijakan unggul dan cerdas tetapi hanya supply sementara atau emergency seperti harga murah, operasi pasar, dan subsidi negara. Itu memang bentuk solusi tetapi sifatnya hanya sesaat."

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu mengungkapkan ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menangani kenaikan harga bahan pokok seperti diperlukannya grand design yang handal, cerdas, dan unggul. Selain itu, perlu adanya kemampuan dan kemauan politik dalam memperkuat posisi tawar privat serta berani menolak terhadap intervensi dan melakukan dialog sebagai penyeimbang karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda.

"Grand design yang dibuat dalam menangani masalah ini dapat dikembalikan pada Kementerian masing-masing di bawah komando presiden, misalnya dan seharusnya melalui Nawacita yang diturunkan pada tingkat kebijakan sektoral hingga lapangan." (lut/dya)

Marak Perang Sarung, Puluhan Remaja Diamankan

SURABAYA - Fenomena perang sarung kerap terjadi pada saat Bulan Suci Ramadan beberapa tahun terakhir ini. Fenomena perang sarung ini juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Aparat keamanan pun terus berupaya untuk melakukan pencegahan sebelum akhirnya para korban berjatuh.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Jawa Timur, mengamankan enam remaja yang diduga hendak melakukan perang sarung. Para remaja tersebut dikenakan sanksi sosial.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya M Fikser mengatakan, para remaja itu diamankan petugas pada Rabu (13/3/2024) dini hari di Jalan Kapas Gading Madya. "Kami melakukan giat rutin Asuhan Rembulan. Dari giat tersebut, tepatnya tim Asuhan Rembulan di wilayah utara, berhasil menjangkau anak-anak yang diduga hendak perang sarung," kata dia, Kamis (14/3/2024).

Menurut Fikser, enam remaja itu diamankan Tim Projopati di Kelurahan Gading, dengan barang bukti empat buah sarung. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP, didampingi personel Polsek Tambaksari.

Remaja yang diamankan itu berinisial F (13), S (14), M (14), D (17), IM (18), serta AR (20). Setelah didata dan dilakukan pembinaan di kantor

Satpol PP, enam remaja tersebut dikenakan sanksi sosial.

Mereka diajak ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Surabaya. Mereka kemudian diminta melakukan tugas layaknya petugas Liponsos. Seperti memotong kuku orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), memotong rambut, juga memberikan makan dan minum para ODGJ.

"Kami ingin dengan adanya sanksi sosial tersebut agar adik-adik tersebut tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain, serta merugikan diri mereka sendiri," kata Fikser.

Fikser mengatakan, Satpol PP juga memanggil orang tua para remaja tersebut. Para orang tua diharapkan dapat membina anak agar tidak terlibat aktivitas yang dapat merugikan.

Menurut Fikser, patroli Asuhan Rembulan bakal terus digalakkan saat Ramadhan ini untuk meminimalkan gangguan ketertiban umum. Termasuk dalam mengantisipasi perang sarung. "Karena fenomena perang sarung ini kan muncul saat bulan puasa, sehingga kami perketat pengawasannya," kata Fikser.

Puluhan remaja yang akan menggelar perang sarung juga diamankan di Mojokerto. Mereka diamankan saat akan menggelar perang sarung di Lapangan Desa Ketidur, Kecamatan Prajuritkulon,

digelandang petugas ke Polres Mojokerto Kota, Kamis (14/03/2024).

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri yang diwakili Wakapolres Kopol Supriyono mengatakan, pihaknya mendapati itu dari sosial media berupa flyer yang berisi ajakan melakukan perang sarung setelah sahur.

"Saat laporan diterima, kami pun bergerak sekitar pukul 05.00 WIB ke lokasi. Benar saja, petugas menemukan sekumpulan remaja yang hendak melakukan perang sarung," ujarnya, Kamis (14/03/2024).

Sementara, Kasat Samapta AKP Anang Leo Afera, menyebut, bahwa para remaja yang terlibat berjumlah 28 remaja terdiri pelajar SD, SMP, SMA, hingga SMA. "Jadi, kami amankan mereka langsung beserta barang bukti berupa sarung yang berisi batu serta motor yang tidak sesuai standar teknis," kata dia.

AKP Anang menambahkan, menurut pengakuan dari para pelaku bahwa aksi perang sarung itu terbilang



Puluhan remaja yang diamankan saat hendak perang sarung di Lapangan Ketidur, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. (Foto : ist)

sudah direncanakan.

"Ini sudah tersusun oleh mereka, karena terdapat beberapa remaja yang diploting di beberapa titik guna memantau jika nanti ada petugas yang sedang melaksanakan patroli," lanjut dia.

Kini, orang tua para remaja, pihak sekolah masing-masing pelaku serta Pemerintah Kota Mojokerto diundang untuk bersama-sama memberikan pembinaan kepada para remaja yang terlibat dalam aksi itu. (lut/dya)

PKB Unggul di Jatim, Raih 27 Kursi DPRD Provinsi

SURABAYA - Sebanyak 10 Partai Politik (Parpol) dipastikan akan mengisi 120 kursi di DPRD Jatim periode 2024-2029. Hal ini menyusul sudah rampungnya rekapitulasi suara tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.

Berdasarkan hasil penghitungan jumlah suara dan di konversi menjadi kursi dengan penghitungan sainte lague, PKB menjadi partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD Jatim. PKB akan mendapat 27 kursi yang tersebar di 14 daerah pemilihan atau dapil di Jawa Timur.

Di masing-masing dapil tersebut, PKB nyaris rata mendapat dua kursi. Hanya di Dapil Jatim I (Kota Surabaya) dan Dapil Jatim 8 (Kediri Raya) yang hanya mendapat 1 kursi. Sedangkan di dapil Jatim 4 atau kawasan Tapal Kuda PKB mengemas 3 kursi.

Jika dibanding Pemilu 2019, jumlah PKB naik dua kursi. Di Pemilu 2019 PKB mendapat 25 kursi DPRD Jatim kalah dengan PDI Perjuangan (PDIP), meski secara jumlah suara PKB lebih unggul dari PDIP.

Bendahara DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi, menyebut jika dilihat dari target yang dicanangkan sebelumnya, perolehan 27 kursi itu sebetulnya belum optimal. Meski begitu, Fauzan menyatakan hasil itu patut disyukuri. Apalagi, berstatus peraih kursi terbanyak.

Pada Pemilu 2019, PKB kata Fauzan memiliki suara besar namun tidak linier dengan perolehan kursi sehingga kalah dari PDIP di DPRD Jatim.

"2024 rasanya lega PKB kembali juara dan mengenakan kembali mahkotanya. Perolehan suara juara, perolehan kursi pun juara," ujar Fauzan, Kamis (14/03/24).

Kata Fauzan, ada banyak faktor yang dibaca mengapa tren kursi PKB naik. Salah satu faktor utama adalah efek ekor jas Pilpres 2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi salah satu kontestan.

Meski Pilpres belum menang, namun proses pemenangan di internal kader disebut optimal sehingga mendongkrak upaya pemenangan Pileg. Lebih jauh Fauzan membaca, perolehan kursi ini sebagai dukungan dari para pemilih loyal PKB.

"Terima kasih kepada semua yang sayang dengan PKB. Para ulama, kiai, bu nyai, gawagis dan nawaning, para santri, loyalis, caleg-caleg PKB di semua level, kontribusi mereka semua adalah saksi sejarah kembalinya tropi kemenangan ke pangkuan PKB," jelasnya.

Fauzan menyebut, PKB tidak akan terlena dengan hasil ini. Apalagi dalam waktu dekat bakal ada Pilkada serentak 2024.

"PKB harus bisa ijo royo-royo kan lagi Jatim. Targetnya sapu bersih kemenangan. 70 persen kader gol,"



Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya.

tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini.

Sementara itu, PDIP harus puas berada di bawah PKB di pemilu 2024 ini dan mendapatkan 21 kursi DPRD Jatim, turun 6 kursi dibandingkan perolehan kursi pemilu 2019 yang mencapai 27 kursi.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari kerika dikonfirmasi menyatakan meski turun, pihaknya tetap bersyukur atas capaian tersebut. Sebab, menurut Untari dukungan suara dari pemilih apalagi berbuah kursi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik.

"Alhamdulillah, tentu kami terimakasih kepada masyarakat Jawa Timur yang masih mempercayakan suara kepada PDI Perjuangan," ujar Untari.

Untari mengakui, Pemilu kali ini memang menjadi tantangan politik tersendiri bagi PDIP. Meski Pilpres mereka kalah di Jawa Timur, namun PDIP Jatim masih bisa bernafas lega sebab hasil Pileg tidak membuat perolehan kursi di DPRD Jatim anjlok tajam.

Jika berkaca dari perolehan kursi DPRD Jatim hasil Pemilu 2024, PDIP berstatus sebagai runner up. Pesaing terdekat PDIP adalah Gerindra, kursi keduanya pada hasil Pemilu 2024 sama yakni 21 kursi. Meskipun sama, Untari bersyukur lantaran dari suara PDIP relatif unggul.

"Tentu ini hasil kinerja seluruh pihak," ucap Untari yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim.

PDIP menyebut tidak akan berlarut-larut dalam hasil Pileg ini. Apalagi, kontestasi Pilkada sudah harus dipersiapkan. Untari mengatakan, beberapa waktu lalu, PDIP sudah menggelar rapat koordinasi sebagai persiapan Pilkada.

"Persiapan Pilkada akan terus kami lakukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jatim, Irwan Setiawan, menyatakan rasa syukur atas hasil yang dicapai dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 ini. Di mana, untuk DPRD Jatim PKS mendaptakan 5 kursi, dan untuk DPR RI juga

mendapatkan 5 kursi dari dapil Jatim.

Irwan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang bersama PKS yaitu pengurus, anggota, dan para caleg serta mitra strategis dari berbagai kalangan. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih PKS pada pemilu 2024.

"Alhamdulillah, kursi untuk PKS di Jawa Timur bertambah, baik di DPRD Jatim maupun DPR RI. Total 5 kursi DPR-RI dari Jatim, serta 5 kursi DPRD Jawa Timur," katanya.

Bila pada tahun 2019, hanya 2 kursi PKS dari Jatim untuk DPR-RI, di Pemilu 2024 ini bertambah 3 kursi menjadi 5 kursi. Demikian juga di DPRD Jatim, bila pada 2019 kursi PKS hanya 4 sehingga masuk Fraksi Gabungan, sekarang bertambah 1 kursi lagi menjadi 5. Kembali menjadi 1 Fraksi Mandiri. "Insya Allah di DPRD Jatim bisa satu Fraksi PKS," ujar pria yang kerap disapa Kang Irwan ini.

Perolehan suara PKS juga mengalami kenaikan baik di untuk perolehan pusat maupun perolehan provinsi. Bila pada tahun 2019 perolehan suara untuk DPR-RI sebanyak 862.840 suara, sekarang menjadi 1.129.863 suara. Total ada kenaikan 267.023 suara.

Untuk perolehan suara provinsi juga mengalami kenaikan sebanyak 312.270 suara. Bila pada Pileg 2019 untuk DPRD Jatim ada 995.390 suara, sekarang menjadi 1.307.660 suara.

Selanjutnya untuk rincian perolehan kursi, perolehan kursi PKS DPR-RI dari Dapil Jatim U (Surabaya - Sidoarjo) 1 kursi, Dapil Jatim IV (Jember - Lumajang) 1 kursi, Dapil Jatim V (Kab. Malang - Kota Malang - Kota Batu) 1 kursi, Dapil Jatim VII (Kab. Ngawi - Kab. Magetan - Kab. Ponorogo - Kab. Trenggalek - Kab. Pacitan) 1 kursi, dan Dapil Jatim VIII (Kab. Mojokerto - Kota Mojokerto - Kab. Jombang - Kab. Nganjuk - Kab. Madiun - Kota Madiun) juga 1 kursi.

Sementara itu untuk perolehan kursi PKS di DPRD Provinsi Jawa Timur, rinciannya Dapil Jatim 1 (Surabaya) 1 kursi, Dapil Jatim 5 (Jember-Lumajang) 1 kursi, Dapil

Jatim 6 (Kab. Malang - Kota Malang - Kota Batu) 1 kursi. Lalu Dapil Jatim 9 (Ngawi - Magetan - Trenggalek - Ponorogo - Pacitan) 1 kursi, dan Dapil Jatim 14 (Bangkalan - Sampang - Pamekasan - Sumenep) 1 kursi.

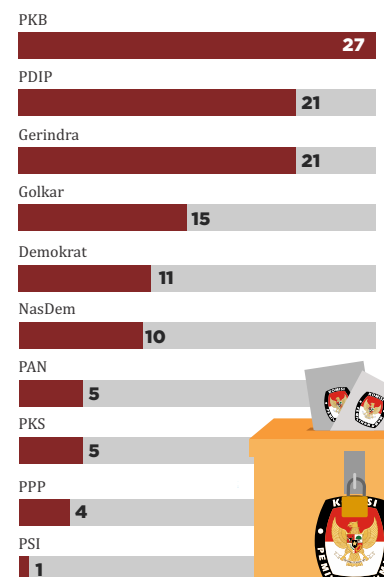
Berdasarkan rekapitulasi suara PKS juga peraih Fraksi PKS tersebar di Kota Surabaya, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Jember, Kota Malang, Kota Batu, Kab. Magetan, Kab. Trenggalek, Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Sampang dan Kab. Pamekasan. Sedangkan peraih pimpinan DPRD meliputi Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Trenggalek.

Atas berbagai capaian tersebut, Irwan menyampaikan tidak boleh sombong bagi yang terpilih dan tercapai. Juga tidak putus asa bagi yang belum terpilih dan tercapai targetnya. Semuanya adalah ketentuan Allah dan semuanya ada kebaikan.

"Mari kita lakukan evaluasi secara objektif dan terukur agar kita termotivasi untuk bersungguh-sungguh dan lebih giat lagi untuk memenangkan pemilu 2029, termotivasi untuk bersabar, dan termotivasi untuk menyusun strategi yang lebih baik kedepan," ujar kang Irwan yang berusia 48 tahun.

Selanjutnya, target PKS adalah persiapan menghadapi agenda Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan November mendatang. Ketua DPW Irwan Setiawan berharap agar gelaran Pilkada mendatang merupakan momentum bagi partai untuk pecah telur anggota menjadi kepala daerah. (lut/dya)

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK UNTUK 120 KURSI DI DPRD JATIM DARI METODE PENGHITUNGAN SAİNTE LAGUE:



Sinyal Pilkada Tetap November 2024

Bupati Malang Sanusi Desak Pelantikan Ditunda hingga 2026

MALANG - Dalam menghadapi potensi tidak dikabulkannya gugatan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Bupati Malang, Sanusi bersama 270 kepala daerah (Kada) lainnya, siap mengambil langkah tegas. Pihaknya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengabulkan opsi penundaan pelantikan paslon terpilih hingga tahun 2026.

Sanusi mengatakan, langkah ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan potensi pemotongan masa jabatan kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada 2020. Diketahui, pelantikan paslon terpilih pada rencananya pada Februari 2025.

Sebelumnya diketahui, bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Sanusi menyuarakan aspirasi agar penyelenggaraan Pilkada pada November 2024 mendatang, dapat diundur ke Desember 2025.

"Kalau Pilkada nya tetap dilaksanakan di November 2024, ya pelantikannya sampai menunggu habis masa jabatan (270 kepala daerah). Itu bukan merubah aturan," ujar Sanusi, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (14/3/2024).

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memastikan adanya

keadilan bagi seluruh pihak, terutama bagi 270 kepala daerah yang telah dipercayakan menjabat sebagai Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota.

"Setelah memenangkan proses Pilkada serentak tahun 2020, saya bersama Pak Wabup baru dilantik pada Februari 2021. Yang jelas hasil Pilkada 2020 ini masa jabatan 5 tahun, kalau dipangkas di tahun 2024, itu akan terkurangi 14 bulan. Karena SK saya berakhir di Bulan Februari 2026," tegas Sanusi.

Lebih lanjut, Sanusi mencontohkan, dalam konteks Pemilu 2024, proses pelantikan pejabat pemerintahan yang dilakukan pada waktu yang berbeda setelah pemilihan, tidak dianggap sebagai masalah konstitusional. Ia mengatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden, anggota DPD RI, anggota DPR RI, serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilantik setelah masa jabatan sebelumnya berakhir dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan demikian, Sanusi menegaskan bahwa pelantikan yang mungkin dilakukan pada tahun 2026 bagi kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024, tidak melanggar konstitusi. "Nanti kita 270 daerah kalau pemilihannya dilaksanakan di November 2024, tetapi pelantikannya



Bupati Malang, Sanusi. (Dok. Prokopim Kabupaten Malang)

nanti februari 2026 kan tidak menyalahi konstitusi," jelasnya. Sanusi.

Sebagai informasi, Sanusi, bersama 12 perwakilan kepala daerah lainnya, memilih untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi. Ke 13 kepala daerah ini mengakukan gugatan ke MK dengan didampingi oleh Visi Law Office dalam

proses hukum tersebut.

Adapun 13 kepala daerah yang mengajukan yudisial review ke MK, yakni Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Pesisir Barat, Bupati Malaka, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Wali Kota Makassar, Wali Kota Bontang, dan Wali Kota Bukittinggi. (Santi/Dya)

Triwulan Kedua Kepemimpinan Pj Wahyu Hidayat

Klaim Pembangunan dan Ekonomi Kota Malang Tumbuh Positif



Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, meninjau pekerjaan proyek median jalan di Kawasan Kayutangan Heritage. (Dok. Prokopim Kota Malang)

MALANG - Memasuki triwulan kedua kepemimpinannya sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan sejumlah progres positif dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Malang.

Wahyu mengatakan, selama hampir 6 bulan kepemimpinannya, terjadi penurunan angka kemiskinan Kota Malang yang mendekati angka Kota Batu, daerah dengan tingkat

kemiskinan terendah di Jawa Timur. Menurutnya, hal ini merupakan indikator penting keberhasilan upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

"Angka kemiskinan kita terus turun, meskipun memang tetap harus kita pantau, kita evaluasi. Tapi dari upaya-upaya yang sudah kita lakukan selama hampir 2 triwulan ini, angkanya sudah signifikan turun," ujar Wahyu, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (14/3/2024).

Tak hanya itu, Wahyu juga mengatakan adanya penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Menurutnya, hal ini menandakan upaya Pemkot Malang dalam berkomitmen memperbaiki kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau persentase angka stunting

di Kota Malang turun hampir satu digit. Walaupun sedikit kan yang penting turun. Karena kalau akumulasinya kan satu tahun, nah ini 3 bulan pertama di 2024 ini alhamdulillah ada progres baik," tambahnya.

Di sisi lain, Wahyu juga menyoroti tantangan fluktuasi inflasi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Namun, langkah-langkah strategis menurutnya telah diambil untuk menekan inflasi dan melindungi pendapatan masyarakat. "Kita terus berupaya untuk bisa menekan inflasi. Kemudian juga perekonomian kita sudah bisa naik, di awal 2024 ini juga perekonomian kita naik. Dan dengan menekan inflasi ini nanti juga akan berimbas ke pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Lebih lanjut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Malang mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah total keseluruhan penduduk di Kota Malang pada tahun 2023 sebanyak 847.182 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang tahun 2023 tercatat sekitar

37,78 ribu orang atau 4,26 persen. Sedangkan di tahun 2022, berada pada angka 38,56 ribu orang atau 4,37 persen.

Menyambung dari pernyataan Pj Wahyu, Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, juga menyampaikan catatan kinerja ekonomi Kota Malang yang cukup positif. Menurutnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang pada tahun 2023 mencapai angka yang signifikan, dengan sektor perdagangan dan industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar.

"Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2023 sebesar 6,07 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 6,32 persen, yang berarti mengalami percepatan - 0,25 persen poin. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi, sementara sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang lebih rendah," ungkap Umar.

Berdasarkan data terkini, Umar juga menyatakan bahwa pada bulan Januari 2024, perekonomian Kota Malang mengalami deflasi sebesar 0,23 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama deflasi. (Santi/Dya)

DUKUNGAN **KEMERDEKAAN** **PALESTINA** DARI GEMERLAP OSCAR

ADA yang beda di perhelatan penghargaan tertinggi insan perfilman dunia Oscar tahun 2024.

Sejumlah selebriti bersuara mendukung kemerdekaan Palestina yang saat ini tengah mendapatkan agresi dari Israel.

Nama-nama besar aktor, aktris dan musisi kompak menyuarakan kemerdekaan Palestina di ajang Oscar malam itu.

Semua mata tertuju pada Oscar malam ini, dan banyak yang menggunakan kesempatan ini untuk mengadvokasi gencatan senjata dan menarik perhatian pada krisis kemanusiaan di Gaza di tengah protes yang sedang berlangsung.

Saat para bintang tampil di karpet merah, banyak orang berkumpul di luar Teater Dolby untuk melakukan

protes mendukung Palestina, menyebabkan kemacetan lalu lintas di dekat lokasi tersebut.

Ratusan pengunjung rasa pro-Palestina berkumpul di luar lokasi sambil mengibarkan bendera Palestina sambil meneriakkan 'Sambil Anda menyaksikan bom dijatuhkan'.

Para pengunjung rasa berkumpul untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap dukungan AS terhadap Israel.

Diorganisir oleh Pekerja Film untuk Palestina, Suara Yahudi untuk Perdamaian LA, Adalah Justice Project, dan Anggota SAG-AFTRA untuk Gencatan Senjata, protes dimulai dengan pawai melalui Hollywood dan memblokir lalu lintas.

Dalam postingan Instagram bersama, kelompok tersebut menulis,

"Kami tidak akan terganggu oleh industri hiburan. Kami AKAN terus menyerukan gencatan senjata permanen dan pembebasan Palestina."

Beberapa bintang, seperti Ramy Youssef dari Poor Thing, memakai kancing merah kecil dengan tangan terulur dan hati hitam, simbol Artists for Ceasefire, sebuah kampanye yang dimulai dengan surat kepada Joe Biden yang menuntut gencatan senjata.

Lainnya, termasuk Swann Arlaud dari Anatomy of a Fall dan Milo Machado Graner, mengenakan bendera Palestina di kerahnya.

Pidato penerimaan penghargaan juga memberikan kesempatan lain untuk menarik perhatian terhadap pemboman Israel di Gaza dan krisis kemanusiaan yang mengancam

kelaparan yang meluas di wilayah tersebut.

Israel telah membunuh lebih dari 31.000 warga Palestina di Gaza sejak 7 Oktober 2023, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

Setidaknya 112 warga sipil Palestina dilaporkan tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga yang sedang berupaya mendapatkan bantuan di Gaza utara, pada Kamis (29/02).

Dalam insiden tersebut, sejumlah saksi mata menyaksikan kerumunan warga sipil berupaya mendapatkan bantuan dari iring-iringan truk yang telah melewati pos pemeriksaan militer Israel di Kota Gaza

Berikut sejumlah artis yang menyuarakan kemerdekaan Palestina di Oscar: (Bisnis)



Mark Ruffalo*



Billie Eilish*



Ava DuVernay*



Ramy Youssef*



Swann Arlaud*



Milo Machado-Graner*



Kaouter Ben Hania*



Eugene Lee Yang, Nimona*



Misan Harriman*



Quannah*

KET

* Ruffalo, yang juga mengenakan pin merah Artists4Ceasefire yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, berteriak 'Kemanusiaan menang!' saat ia bergegas menuruni karpet merah di Teater Dolby di Los Angeles, California pada 10 Maret.

* Mengenakan pin Artists For Ceasefire.



INI MANFAAT KONSUMSI

MAKANAN SEIMBANG DAN LENGKAP SAAT PUASA

PAKAR Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Universitas Airlangga (Unair) dr Abdul Jabbar Al Hayyan SpKFR mengungkapkan,

masyarakat perlu memperhatikan setiap penyajian makanan ketika berbuka dan sahur ketika menjalankan ibadah puasa.

Menurutnya, makanan saat sahur dan berbuka puasa harus mengandung komposisi yang lengkap dan seimbang. Misalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan serat.

"Komposisi yang seimbang ini dapat membantu tubuh menyerap makanan dengan baik serta mengubahnya sebagai cadangan energi selama beraktivitas saat berpuasa," ungkapnya, Selasa (12/03/2024).

Untuk itu, dosen Fakultas Kedokteran (FK) Unair ini menyarankan agar masyarakat mengonsumsi real food bukan process food agar tubuh menerima komposisi makanan dengan baik.

"Kita boleh mengonsumsi apapun selama berpuasa namun perlu diingat menjaga komposisi tiap makanan juga

penting. Contohnya, pada terang bulan menjadi hidangan favorit saat berbuka. Namun, kalori yang dimiliki terang bulan terlalu besar dan komposisinya tidak seimbang," tuturnya.

Tak lupa, ia berpesan untuk masyarakat memegang teguh dalam menjaga kesehatan dan pola makan selama berpuasa. Apalagi saat berbuka puasa, biasanya masyarakat memiliki hasrat untuk mengonsumsi semua jenis makanan secara berlebihan.

"Salah satu sunnah Rasul dapat mewakili, bahwa kita makan saat lapar namun kita harus mengetahui batasan-batasan saat kita dirasa cukup kenyang. Dengan ini, tubuh yang prima dapat membantu kita dalam memaksimalkan ibadah selama berpuasa," tukasnya.

Setelah berpuasa seharian penuh, sebaiknya tidak langsung tergesa-gesa mengonsumsi makanan dalam jumlah besar agar tidak terjadi gangguan pada pencernaan.

Berbuka puasa dapat diawali dengan minum segelas air hangat atau teh tawar hangat agar lambung siap

menerima makanan.

Kemudian, sekitar lima hingga sepuluh menit kemudian, makanlah makanan dengan manis alami dalam jumlah wajar. Kamu bisa mengonsumsi kolak atau pisang.

Jika tak mau repot, kamu bisa mengonsumsi 3-5 biji kurma. Kurma ini akan setara dengan 100-150 kalori.

Selain itu, kurma sangat mudah dicerna dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Makanan manis sangat dianjurkan saat memulai buka puasa, karena karbohidrat sederhana lebih mudah dicerna oleh tubuh.

Gunanya adalah untuk menggantikan cadangan gula darah yang terpakai saat berpuasa selama belasan jam sebelumnya.

Anda bisa mengonsumsi makanan yang lengkap dan seimbang dengan kandungan karbohidrat dan lemak yang bersumber dari bahan-bahan yang alami.

Serat, vitamin, dan mineral dari buah dan sayur juga harus dikonsumsi guna melindungi organ pencernaan selama berpuasa.

Selain kandungan makanan yang harus diperhatikan, jumlah yang

dikonsumsi juga harus sesuai.

Untuk memenuhi kebutuhan kalori saat puasa, bisa mengonsumsi sedikit makanan kecil, seperti yoghurt, susu, dark chocolate, buah-buahan, atau smoothies menjelang tidur.

Makan makanan yang tepat sebelum tidur sangat penting untuk meningkatkan kualitas tidur hingga menjelang sahur nanti.

Saat sahur, juga sebaiknya tidak mengonsumsi makanan yang hanya sekadar praktis dan mengenyangkan.

Karena makan sahur adalah satu-satunya sumber energi kamu untuk menjalani puasa seharian nanti. Jadi, komposisi makanan yang dikonsumsi kurang lebih sama dengan makanan utama saat berbuka puasa.

Bedanya, saat sahur sebaiknya lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah dengan kandungan serat yang tinggi, supaya dapat membantu memberi rasa kenyang lebih lama.

Serta untuk memaksimalkan gizi yang ada pada tubuh selama bulan puasa, kamu bisa mencoba untuk berhenti makan sebelum merasa kekenyangan (Amanah Nur Asiah-mg/halodoc)

"Komposisi yang seimbang ini dapat membantu tubuh menyerap makanan dengan baik serta mengubahnya sebagai cadangan energi selama beraktivitas saat berpuasa,"

dr Abdul Jabbar Al Hayyan SpKFR



XIAOMI LUNCURKAN PENGIRIMAN MOBIL LISTRIK PERTAMA

PADA hari Selasa (12/3/2024), perusahaan Xiaomi mengumumkan rencananya untuk memulai pengiriman model kendaraan listrik (EV) pertamanya, SU7, dalam bulan ini.

Dalam sebuah postingan di platform media sosial Weibo, produsen smartphone terbesar kelima di Tiongkok itu mengumumkan bahwa mereka telah menyiapkan 59 toko di 29 kota di seluruh negeri untuk menerima pesanan.

Acara peluncuran resmi telah dijadwalkan pada tanggal 28 Maret mendatang, dimana label stiker untuk kendaraan listrik (EV) baru mereka akan diumumkan kepada publik.

Saham Xiaomi menguat 7 persen selama perdagangan pada pagi hari.

Penjualan mobil listrik di Tiongkok mengalami kenaikan sebesar 18 persen selama periode Januari-Februari, yang tidak terlalu jauh dari pertumbuhan sebesar 21 persen yang diperkirakan akan terjadi sepanjang tahun 2023.

Dalam menghadapi melemahnya permintaan domestik, terjadi pemotongan harga yang lebih dalam. Fenomena itu dimulai oleh pemimpin pasar, BYD, dengan harapan menarik konsumen ke dalam pasar yang semakin kompetitif.

Saat mengumumkan peluncuran sedan Speed Ultra 7 (SU7) pada bulan Desember tahun lalu, CEO Lei Jun menyampaikan rencana ambisius Xiaomi untuk menjadi salah satu dari lima produsen mobil teratas di dunia.

Menurut pernyataan CEO Lei, SU7

dilengkapi dengan teknologi "motor listrik super" yang diklaim mampu memberikan akselerasi yang lebih cepat dibandingkan dengan mobil listrik Tesla dan Porsche.

Para pengamat memperhatikan bahwa integrasi sistem operasi mobil dengan ponsel Xiaomi dan perangkat elektronik lainnya mungkin akan menarik bagi pelanggan yang telah terbiasa dengan ekosistem Xiaomi.

Hal ini dapat memperkuat loyalitas pelanggan terhadap merek Xiaomi dan membantu mendorong adopsi mobil listrik Xiaomi di pasar yang semakin kompetitif.

Xiaomi telah melakukan upaya untuk melakukan ekspansi di luar bisnis intinya dengan memasuki pasar kendaraan listrik, terutama mengingat penurunan penjualan smartphone yang mengalami stagnasi. Rencana ini pertama kali diumumkan pada tahun 2021 sebagai bagian dari strategi perusahaan.

Mobil-mobil Xiaomi akan diproduksi di sebuah pabrik yang dimiliki oleh BAIC Group, sebuah unit

produsen mobil milik negara, yang terletak di Beijing. Pabrik ini memiliki kapasitas tahunan sebesar 200.000 kendaraan.

Perusahaan smartphone raksasa itu telah menegaskan komitmennya untuk menginvestasikan 155 triliun rupiah ke dalam industri otomotif selama satu dekade.

Sebagai salah satu pemain baru di pasar mobil listrik China, perusahaan ini berhasil mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang meskipun otoritas berwenang cenderung menahan penambahan pasokan baru.

Didesain sebagai mobil sport bertenaga listrik, Xiaomi SU7 punya dimensi panjang 4,997 meter, lebar 1,963 meter dan tinggi 1,455 meter serta wheelbase 3 meter.

Mobil tersedia dua pilihan sistem gerak, penggerak belakang (RWD) yang menggunakan motor penggerak 220 kW dan torsi 400 Nm.

Sedangkan varian atas penggerak semua roda (AWD) disokong motor 495 kW dan torsi 838 Nm. Akselerasi 0-100 km per jam dalam 2,78 detik, dan kecepatan tertinggi 265 km per jam dan diklaim mampu tempuh jarak sejauh 800 km satu kali cas.

Bobot mobil mencapai 1.980 kg dan, dan varian tertinggi beratnya 2.205 kg plus baterai. Baterai menggunakan lithium iron phosphate (LFP) hasil rekayasa BYD.

Interiornya menyuguhkan layar kendali sentuh berukuran 16,1 inci. Sedangkan panel instrumen berukuran 7.1 inci menyajikan informasi kendaraan.

Sedangkan sistem operasi pada head unit murni besutan Xiaomi yakni HyperOS ditentagai Qualcomm Snapdragon 8295, ada juga fitur ADAS untuk membantu meningkatkan keselamatan berkendara (Lenteratoday)



XIAOMI SU7





LAYANAN TAXI SWAKEMUDI DI LOS ANGELES MULAI DITAWARKAN

WAYMO, dikenal juga sebagai Proyek Mobil Swakemudi Google, mengatakan pada hari Rabu (13/3/2024) bahwa mereka akan mulai menawarkan layanan robotaxi tanpa sopir secara cuma-cuma kepada beberapa masyarakat di Los Angeles mulai hari Kamis (14/3/2024).

Perusahaan ini telah menerima persetujuan dari Komisi Utilitas Publik California (CPUC) pada awal bulan ini untuk memulai program ride-hailing, Waymo One, di Los Angeles dan beberapa kota di dekat San Francisco.

Rencana terbaru Waymo ini menjadikannya lebih unggul dari saingannya, Cruise, yang dimiliki oleh General Motors, yang saat ini sedang menghadapi pengawasan setelah sebuah mobil Cruise tanpa pengemudi menyeret pejalan kaki sejauh 20 meter setelah sebuah kecelakaan.

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa layanan ini akan tersedia di 63 mil persegi dari Santa Monica ke pusat kota Los Angeles, dan menambahkan bahwa layanan antarnya di tahap awal akan gratis.

"Kami akan secara permanen

menyambut pengendara ke dalam layanan kami, secara bertahap menerima lebih dari 50.000 orang dalam daftar tunggu LA dan terus membagikan kode sementara di acara-acara lokal di seluruh kota," kata Waymo dalam sebuah posting blog.

Perusahaan lebih lanjut menambahkan bahwa mereka akan memperluas operasinya di Los Angeles dari waktu ke waktu dan bertransisi ke layanan berbayar dalam beberapa minggu mendatang.

Waymo memulai layanan swakemudi untuk para karyawannya di Austin, Texas, menjadikannya kota keempat yang memiliki layanan swakemudi setelah San Francisco, Phoenix, dan Los Angeles. Rencananya, Waymo akan menawarkan Waymo One kepada publik yang lebih luas di Austin pada akhir tahun ini.

Melintasi sungai

Diberitakan Antara, sebuah Robotaxi melintasi dua jembatan di atas Sungai Yangtze, Selasa pagi di Wuhan, Hubei, China tengah, yang menjadikan kota tersebut sebagai kota

pertama mengoperasikan layanan transportasi otonom komersial yang melintasi sungai itu.

Layanan taksi swakemudi tersebut dikembangkan dan dioperasikan oleh platform kemudi otonomos Baidu, Apollo Go.

Pada 2023, zona demonstrasi uji coba Whun untuk kendaraan cerdas yang terhubung di China mencatat hampir 500 kendaraan otonom beroperasi secara reguler, termasuk taksi otonom dan bus swakemudi.

Selama periode tersebut, Wuhan mencatat lebih dari 732.000 pesanan

untuk layanan perjalanan dengan kendaraan otonom yang melayani 900.000 perjalanan, menurut pihak otoritas setempat.

Sejauh ini, lebih dari 20 kota di China telah meluncurkan kebijakan yang mendukung uji coba kemudi otonom, dan lebih dari 60 perusahaan telah memperoleh izin uji coba kemudi otonom (Sumber: Channel News Asia/Penerjemah: Lambang-mk)



ROBOTAXI CHINA

Waymo (Tampak Dalam)



Indeks Demokrasi ... (dari Hal 1)

EKONOM senior Faisal Basri menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya tidak baik-baik saja. Ia mengatakan, indeks demokrasi Indonesia 2024 versi V-Dem Institute terjun bebas.

Varieties of Democracy (V-Dem) adalah lembaga yang biasa mengukur indeks demokrasi di negara dunia. Mereka menggunakan data multidimensi dalam menilai kualitas demokrasi sebuah negara.

"Democracy index kita terjun bebas, Democracy Index 2024 [versi V-Dem] melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas mendekati 0, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste," kata Faisal Basri dalam acara Universitas Memanggil di Gedung IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2023).

Tema acara ini adalah "Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Peradaban Bangsa dan Hak Kewargan".

"Kita terbaik (dulu) di urutan ke-63, sekarang 87, skornya terbaik 0,53 dibikin sama Jokowi jadi tinggal 0,36," tambah Faisal.

Faisal Basri menilai demokrasi Indonesia merosot tajam setelah Jokowi yang diusung PDIP jadi presiden pada 2014.

Ia mengkritik jalan mulus Gibran, putra bungsu Jokowi, yang kemungkinan bakal dilantik jadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Jokowi jadi presiden (tahun 2014 saat) demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi," kata Faisal.

"Karena dia (Jokowi) tahu demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinasti politik hadir, dia harus rusak dulu demokrasi baru Gibran bisa jadi wakil presiden," tutur dia.

Lebih jauh, Faisal Basri mengatakan indeks demokrasi RI yang mendekati 0 juga diperparah dengan kekayaan alam dirampok, timah habis hingga batu bara dijual ke China.

"Luar biasa. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutur Faisal Basri.

Diketahui, sejumlah guru besar dan akademisi lintas kampus menyatakan siap turun ke jalan menyuarakan kemunduran demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jadi yang turun ke jalan bukan hanya mahasiswa, guru besarnya juga turun! Dosennya juga turun, ilmuwan-ilmuwan kampus juga turun. Karena apa? Situasi ini adalah persoalan hidup atau hancurnya bangsa kita," Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Hafid Abbas. "Kalau tidak bergandengan tangan dengan semua kekuatan, Indonesia tak bisa melawan

segala macam penyimpangan demokrasi yang terjadi selama ini."

Adapun kegiatan Temu Ilmiah-Universitas Memanggil bertujuan mengumpulkan berbagai lapisan masyarakat dan akademisi dari kampus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, itu, untuk mengingatkan pemerintah tidak merusak proses demokrasi yang diperlihatkan tanpa malu pada akhir-akhir ini.

Iqbal Cheisa, selaku perwakilan dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mengatakan mereka telah sepakat bakal turun ke jalan sebelum pengumuman hasil Pemilihan Presiden 2024 pada 20 Oktober mendatang. Mahasiswa hingga elemen masyarakat lain masih terus menggalang kekuatan untuk menggelar aksi turun ke jalan.

"Buat turun ke jalan tentu dan pastinya itu akan menjadi opsi kami saat nantinya demokrasi ini membutuhkan kami untuk turun ke jalan. Turun ke jalan pasti akan jadi opsi pertama kami nantinya," katanya.

Para guru besar hingga akademisi yang terlibat dalam kegiatan Temu Ilmiah Kampus Memanggil sepakat akan terus menyuarakan pendapat mereka soal bobroknya demokrasi yang mewarnai Pemilu 2024 ini. Salah satunya putusan kontroversi Mahkamah Konstitusi yang memberikan karpet merah untuk putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. Putusan tersebut dinyatakan cacat etika karena melibatkan Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.

Dalam kesempatan yang sama Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, "Hukum juga melegitimasi kekuasaan, melalui ketatanegaraan sehingga hari-hari ini kita disibukkan oleh UU pemilu, kita disibukkan oleh angka kemenangan. Seakan-akan demokrasi hanya sekadar angka."

Bivitri mengutarakan, penegakkan hukum memang mengerikan. Membatasi demokrasi selama dua periode. Ia menekankan, demokrasi suatu kekuasaan yang harus dibatasi.

"Inilah negara hukum yang dulu sebenarnya dipertahankan oleh para filsuf. Ketika kita berbicara bahwa negara, harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Bukan soal pasal-pasal hukum, bukan soal angka kemenangan dalam pemilu, tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan," tegas Bivitri.

Bivitri menegaskan, demokrasi baik adalah yang selalu gaduh. Sehingga masyarakat bisa aktif menyuarakan partisipasinya. Namun, jika tidak ada kegaduhan nilai demokrasi itu dipertanyakan.

"Demokrasi yang tenang, menurut saya adalah otokratisme terselebung, karena orang-orang dilarang melawan. Bagaimana kritik terhadap kekuasaan pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan, makanya namanya otokratik, otokratisme yang didukung oleh legalisme," pungkas Bivitri.

Sebelumnya, sejak akhir Januari



Jajaran intelektual universitas se-Jabodetabek, (dari kiri): Guru besar IPB Andreas Santoso, guru besar UIN Saiful Mujani, akademisi UNJ Ubudillah Badrun, guru besar UI Sulistyowati Irianto, guru besar UI Valina Singka Subekti, guru besar STF Driyarkara Dwi Kristanto, ekonom senior UI Faisal Basri, dan guru besar UNJ Hafid Abbas, membacakan Seruan Salemba dalam acara Temu Ilmiah Universitas se-Jabodetabek di FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (14/03/2024).ist

2024, sebelum pemungutan suara, akademisi di berbagai wilayah sudah menyerukan kritik terhadap kemunduran demokrasi. Hal itu dilatarbelakangi dugaan penyalahgunaan kekuasaan lewat pengaturan hukum demi kepentingan tertentu.

Kini, seruan akademisi itu terus berlanjut sesuai pemungutan suara 14 Februari 2024. Mereka berharap agar anggota DPR menjalankan fungsi pengawasan berupa hak angket untuk menyelidiki kecurangan dalam Pemilu 2024.

Sorotan dari Dunia

Terpisah Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Pertanyaan itu disampaikan pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3/2024). Ndiaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024.

Sidang tersebut dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk RI. Pembahasan seputar isu HAM terbaru di sejumlah negara dibahas di forum itu dengan sesi tanya jawab antara masing-masing anggota komite HAM PBB kepada perwakilan negara yang dibahas.

Sementara itu, anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye, menanyakan isu HAM terkait dinamika Pemilu 2024 RI.

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres.

"Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata Ndiaye dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, Selasa (12/3/2023).

Dia menambahkan, "Apa langkah-langkah diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu?"

Tak berhenti di situ, Ndiaye juga bertanya apakah Pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut.

Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan itu. Saat sesi menjawab, delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lain.

Beberapa isu yang dijawab Indonesia tentang dugaan pengurangan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris-Fathia. Delegasi Indonesia juga menjawab soal hak politik orang asli Papua yang ditanyakan Ndiaye bersamaan dengan kasus pencalonan Gibran.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyanggah aksi para delegasi Indonesia di Sidang CCPR. Dia menilai banyak jawaban dari delegasi yang tidak menjawab isu-isu krusial terkait HAM dan demokrasi di Indonesia.

Dimas menyebut hal ini sebagai bentuk kegagalan Pemerintah Indonesia menunjukkan kemajuan HAM di Indonesia.

"Tidak sedikit juga pertanyaan yang tidak dijawab dengan lugas, seperti pelanggaran etik Gibran Rakabuming Raka, penguatan KuPP di Indonesia terkait isu penyiksaan, serta penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap masyarakat sipil yang mengekspresikan opini dan pendapatnya di demonstrasi," ujar Dimas melalui keterangan tertulis, Kamis (14/3/2024).

Diketahui saat ini makin menguat terkait rencana membentuk koalisi besar. Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti.

Dolly bilang pembahasan mengenai peran Presiden Jokowi dilakukan secara internal antar parpol pengusung Prabowo-Gibran.

Dolly menambahkan, pembahasan soal peran Jokowi dalam parpol Koalisi Indonesia Maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program-program Prabowo-Gibran.

Sejumlah partai politik tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI. Belakangan, muncul usulan dari PSI bahwa Jokowi semestinya memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi-misi menuju Indonesia Emas. (ant,kcm,ist, wid,rls,kum/dya)

Pemerintah Resmi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri, Mendag Zulhas: Oleh-oleh Boleh

JAKARTA-Pemerintah resmi menerapkan aturan pembatasan jumlah barang bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri mulai 10 Maret 2024. Aturan tersebut diterbitkan menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 pada Desember lalu. Adapun barang bawaan yang dibatasi di antaranya, tas, barang tekstil, alas kaki, laptop, hingga telepon seluler.

Namun aturan itu dikecualikan untuk barang bawaan berupa oleh-oleh yang dibawa tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun jamaah haji dan umrah. Sebab, barang bawaan tersebut tidak untuk dijual.

"Ya kalau buat bagi-bagi kan enggak apa-apa. Ini kan buat yang beli baru, buat dijual lagi, itu kena," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau biasa disapa Zulhas di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Zulhas mengatakan, aturan pembatasan jumlah barang bawaan tersebut diterapkan bila penumpang membawa barang-barang untuk dijual kembali di Tanah Air. "Iya yang buat dagang kan. Kan kalau dagang itu kan harus ada, kamu beli tas, harus ada kardusnya, bon-nya, kan gitu. Kalau buat oleh-oleh kan enggak satu kardus isinya 100. Ya enggak apa-apa buat oleh-oleh kan," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulhas memastikan, pihak Bea Cukai memiliki skema untuk membedakan barang bawaan untuk oleh-oleh dan barang bawaan untuk dijual kembali alias jastip. "Ya itu urusan Bea Cukai, mereka yang tahu. Kan sudah biasa kok. Justru yang sekarang diatur itu, yang dulu dikenakan sekarang enggak," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) resmi menerapkan pembatasan jumlah barang bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri. Pembatasan jumlah barang bawaan itu mulai dilakukan sejak 10 Maret 2024, menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 pada Desember lalu.

Lewat aturan itu, pemerintah mengubah ketentuan pengawasan barang masuk terhadap komoditas-komoditas tertentu, dari semula pengawasan post border atau dilakukan setelah keluar kawasan paeban, menjadi border atau pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai.

"Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ini diundangkan pada tanggal 11 Desember 2023, setelah melalui masa transisi 90 hari maka secara resmi akan diberlakukan mulai tanggal 10 Maret 2024," tulis unggahan akun



Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengunjungi pasar Blok A Tanah Abang di Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2024). Ist

Instagram resmi Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Dengan diterapkannya aturan tersebut, maka diberlakukan pembatasan terhadap barang bawaan dari luar negeri yang pengawasannya dilakukan oleh Bea Cukai.

Pengusaha Minta Kelonggaran

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Pemerintah agar memberikan kelonggaran waktu (grace period) bagi pelaku usaha dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, terkait tahap persiapan untuk pemberlakuan peraturan pelarangan terbatas.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe, mengatakan Kadin Indonesia selaku induk dari seluruh asosiasi usaha di Indonesia telah menerima berbagai masukan dari asosiasi sektoral terdampak hingga usaha jastip.

Terkait kesiapan Infrastruktur dan peraturan pendukung, Kadin menghimbau agar sistem elektronik dan seluruh peraturan pelaksana terkait Permendag 36/2023 sudah siap paling tidak 3 sampai 6 bulan sebelum pelaksanaan peraturan ini dijalankan.

"Hal ini diperlukan guna mengakomodir lonjakan permohonan perizinan dan untuk memberikan waktu yang memadai kepada seluruh pihak yang terkait guna memenuhi ketentuan peraturan tersebut," kata Juan dalam keterangan Kadin.

Diketahui, muncul penolakan dari industri maupun pelaku usaha jasa

titip (jastip) yang masih bergantung terhadap produk-produk asal impor

Menanggapi itu, Mendag Zulkifli Hasan akan melakukan evaluasi "Karena Permendag 36 itu banyak keluhan, bawa sepatu lah, soal beda dan segala macam. Nanti kita evaluasi," kata Mendag Zulhas kepada awak media di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).

Mendag Zulhas menyampaikan pihaknya akan berkiriman surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi penerapan Permendag 36. Evaluasi tersebut salah satunya akan menyoroti penerapan aturan makanan asal impor.

"Nanti kita evaluasi kita bikin surat ke Menko untuk dibahas kembali. Misalnya makanan, masa mesti ada rekomendasi kan enggak perlu," jelasnya.

Dia mengatakan, aturan terkait pembatasan barang bawaan penumpang pesawat asal luar negeri sudah lama diterapkan. Namun, dalam Permendag 36 dikhususkan pembatasan hanya dua pasang di tiap barang.

"Jadi kalau barang masuk, belanja, bayar dikenakan, kalau saudara beli tas Chanel buat di sini bea cukai dikenakan pungutan. Sekarang di atur yang beli lebih dari dua pasang, kalau dua pasang enggak apa-apa," terangnya.

Oleh karena itu, Zulhas menilai bahwa adanya aturan Permendag 36 justru sebenarnya membantu penumpang asal luar negeri. Karena adanya kelonggaran membawa maksimal dia barang impor tanpa harus melewati pengecekan bea cukai.

"Kalau dulu kalau pajak kan harus bayar. Sebenarnya Permendag ini membantu, sekarang kalau beli dua pasang enggak apa-apa," pungkas. (wid,rls,ist,ant/dya)

SEJUMLAH BARANG YANG DIBATASI BESERTA BATASANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Hewan dan produk hewan (Maksimal 5 kg dan tidak lebih 1.500 dollar AS per penumpang atau awak sarana pengangkut)
- Beras, jagung, gula, bawang putih, dan produk hortikultura (Maksimal 5 kg dan tidak lebih 1.500 dollar AS per penumpang atau awak sarana pengangkut)
- Mutiara (Bernilai maksimal free on board (FOB) 1.500 dollar AS)
- Hasil perikanan (Maksimal 25 kg per pengiriman)
- Telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet (Maksimal 5 unit per orang dalam kedatangan jangka waktu 1 tahun)
- Mainan (Bernilai maksimal FOB 1.500 dollar AS) Tas (Maksimal 2 piece per orang)
- Alas kaki (Maksimal 2 piece per orang)
- Elektronik (Maksimal 5 unit dan bernilai maksimal FOB 1.500 dollar AS per orang)
- Sepeda roda dua dan roda tiga (Maksimal 2 unit per orang)
- Minuman beralkohol (Maksimal 1 liter per orang)
- Plastik hilir (Bernilai maksimal FOB 1.500 dollar AS)
- Barang tekstil sudah jadi lainnya (Maksimal 5 piece per orang)